

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BALAKANG MASALAH

Dalam era reformasi di negara kita, begitu banyak tuntutan rakyat untuk memakmurkan daerah mereka. Kemandirian suatu daerah atau otonomi menjadi harapan penting untuk perkembangan daerah itu sendiri. Pemerintah memberikan batasan atas otonomi tersebut dengan dibentuknya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dalam rangka pemberian otonomi daerah, agar daerah mampu menjalani wewenang dari pusat secara baik.

Berdasarkan UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama dari kedua Undang-undang tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke PEMDA, tetapi lebih penting keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan pelayanan kepada masyarakat yang tercermin dalam anggaran pemda.

Setiap PEMDA di Indonesia memiliki anggaran daerah yang merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Menurut UU No. 22 tahun 1999 penyusunan anggaran melibatkan eksekutif dan legislatif melalui sebuah tim yang disebut panitia anggaran. Eksekutif berkewajiban membuat rancangan APBD yang akan diimplementasi setelah mendapat persetujuan DPRD dalam proses ratifikasi anggaran.

Pada dasarnya pemerintah tidak memiliki dana sendiri karena dana yang dimiliki pemerintah adalah dana milik masyarakat yang memberikan mandat kepada pemda dalam bentuk kebijakan publik dan program yang memberi manfaat bagi masyarakat yang direfleksikan dalam bentuk anggaran (Abdul Halim, 2007).

Adanya keterbatasan biaya, menyebabkan anggaran memiliki *trade off*, sehingga sebagian anggaran tidak dapat di alokasikan dalam satu bidang tanpa mengurangi alokasi bidang lainnya. Pemerintah akan memutuskan bidang mana yang akan didahulukan atau diprioritaskan. Anggaran berfungsi sebagai alat politis yang digunakan untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan pada sektor tersebut (Theresia, 2007)

Mardiasmo (2000) menyatakan bahwa Besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam suatu wilayah Kota atau Kabupaten dapat dijadikan suatu gambaran mengenai potensi pemda tersebut. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting, ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah yang mana peranan PAD diharapkan dan diupayakan utama

dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah berusaha meningkatkan penerimaan yang berasal dari daerahnya sendiri.

Sehubungan dengan adanya otonomi yang diperluas dan tak lepas dari tanggung jawab, maka daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam bidang sarana dan prasarana fisik untuk daerahnya. Hal ini menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Daerah, karena demi memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat membutuhkan biaya yang relatif besar. Oleh karena itu, Pemerintahan Daerah hendaknya berupaya meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah untuk menutup biaya tersebut (HAW.Widjaja, 2002).

Jika Pemerintah Daerah hanya mengandalkan sumbangan dan bantuan Pemerintahan Pusat, berarti daerah itu belum siap menjalani otonomi yang diwewenangkan oleh Pemerintah Pusat. Seharusnya Pemerintah Daerah mulai menggali potensi pendapatan daerahnya untuk pembangunan. Hal ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai berbagai kegiatan pembangunan (Mudrajad, 2004).

Pelaksanaan program-program pembangunan di segala bidang berlangsung secara terus menerus dan dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Karena tidak memungkinkan Pemerintah Pusat untuk mengawasi dan menjalani pembangunan seluruh daerah di Indonesia, maka pembagian kewenangan seperti ini akan memudahkan Pemerintah Pusat mewujudkan cita-cita bangsa (Mardiasmo. 2004).

Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah, namun proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah merupakan indikasi kemampuan daerah dalam usaha menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Upaya untuk meningkatkan pendapatan tentunya tidak terlepas dari peranan PAD seperti penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan serta penerimaan daerah lainnya (Mubyarto, 2001).

Darwanto & Yustikasari (2007) menyatakan bahwa pemerintah khususnya pemerintah daerah masih membatasi investasi untuk belanja modal termasuk manambah sarana dan prasarana pelayanan publik. Selama ini alokasi anggaran hanya terfokus pada pembayaran gaji pegawai dan belanja rutin lainnya. Seharusnya anggaran lebih banyak dialokasikan dalam investasi belanja modal, karena hal ini akan meningkatkan jumlah sarana dan prasarana pelayanan publik.

Dipilihnya Kabupaten/Kota DIY sebagai objek penelitian karena Kabupaten/Kota DIY merupakan propinsi yang menjadi tujuan utama pariwisata bagi para wisatawan domestik maupun wisatawan lokal. Dengan pariwisata maka pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah akan bertambah seperti pajak hotel, pajak hiburan dan retribusi parkir. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul :

”PENGARUH PENDAPATAN DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH DI KABUPATEN/KOTA DI KOTA PROPINSI DIY .

B. BATASAN MASALAH

1. Otonomi Daerah berdasarkan UU. No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU. No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2. Pendapatan Daerah dibatasi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Belanja Daerah dibatasi dengan Belanja Langsung, dan Belanja Modal.
4. Kepmendagri No. 29 tahun 2002 tentang Pendoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

C. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Langsung?
2. Apakah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal?

D. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Langsung.
2. Pajak daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal.

E. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain:

a. Bagi Peneliti

Memberikan tambahan gambaran tentang Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah di era Otonomi Daerah yang berlangsung di Kabupaten/Kota Propinsi DIY.

b. Bagi Akademis

Diharapkan berguna dalam memperluas cakrawala dan tambahan informasi untuk menemukan dimensi-dimensi baru dalam bidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan Asli Daerah serta Belanja Daerah.

c. Bagi Propinsi DIY

Propinsi DIY dapat mengukur peningkatan atau penurunan Pendapatan Daerah Dan Belanja Daerah yang kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.